



**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN  
KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**RAMDHANI NUR SAFITRI**

**NPM: 21601082021**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Sampel penelitian sebanyak 47 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan Metode Purposive Sampling. Dalam melakukan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel bebas. Variabel Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa juga berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima.

**Kata Kunci:** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine whether there is an influence of the application of government accounting standards (SAP) and the quality of local government apparatuses on the quality of financial statements presented by government organizations. The population in this study are civil servants (PNS) who work in the Bima Regency Government. The research sample of 47 respondents. The sampling method uses Purposive Sampling Method. In conducting data analysis, using multiple linear regression analysis with the variable Implementation of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatus as an independent variable. Variable Quality of Financial Statements as the dependent variable. Based on the results of research conducted prove that the Application of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatus has a partial influence on the Quality of Financial Statements. The results also showed that it also had an influence on the Application of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatuses had a simultaneous influence on the quality of the Bima Regency Government Financial Statements.*

**Keywords:** *Application of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Apparatus, Quality of Financial Statements.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu bentuk pengolahan dan pencatatan data keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pedoman, petunjuk, maupun aturan yang akan digunakan atau dijadikan acuan oleh aparatur pemerintah (akuntan) sebagai prosedur yang diambil dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan yang diambil mengenai alokasi sumber daya. Tujuan lain dari akuntansi pemerintah adalah untuk memastikan dana yang diperoleh dari publik dibelanjakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sehingga memberikan kemaslahatan

bagi rakyat. Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas dana publik baik itu dari pajak, retribusi daerah, dan transaksi-transaksi lainnya.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan sebagai bentuk untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 71 tahun 2010, yaitu:

1. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang sudah dicapai.
4. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik dalam periode jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari hasil pungutan pajak dan hasil pinjaman.

6. Menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

Dengan demikian agar laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas maka laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menyusun laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup tertib administrasi dan taat peraturan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu indikator yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sudah berkualitas.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka sebagai aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan mengetahui apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah.

Kabupaten Bima NTB sebagai daerah yang masih berkembang menjadikan daerah ini perlu untuk diteliti bagaimana pengaruhnya apabila diterapkannya suatu standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, dan bagaimana pula kualitas aparatur pemerintah daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap laporan keuangan ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

**Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:**

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini peneliti berusaha memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

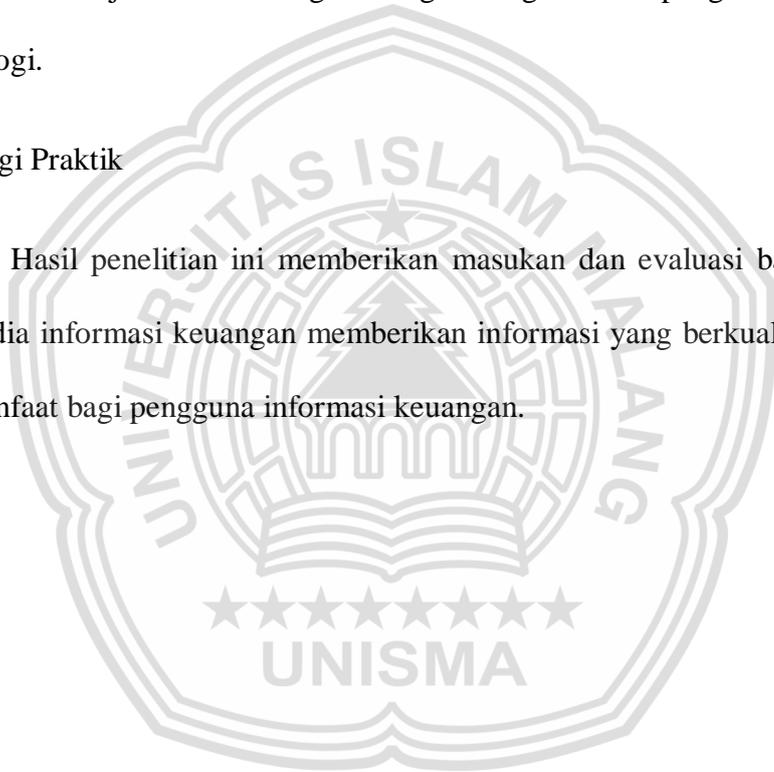
Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, pemeriksaan akuntansi, dan akuntansi manajemen. Dan diharapkan menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 3. Bagi Praktik

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan evaluasi bagi para penyedia informasi keuangan memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat di ambil suatu kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa penerapan SAP (X1) dan kualitas aparatur pemerintah daerah (X2) memiliki pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

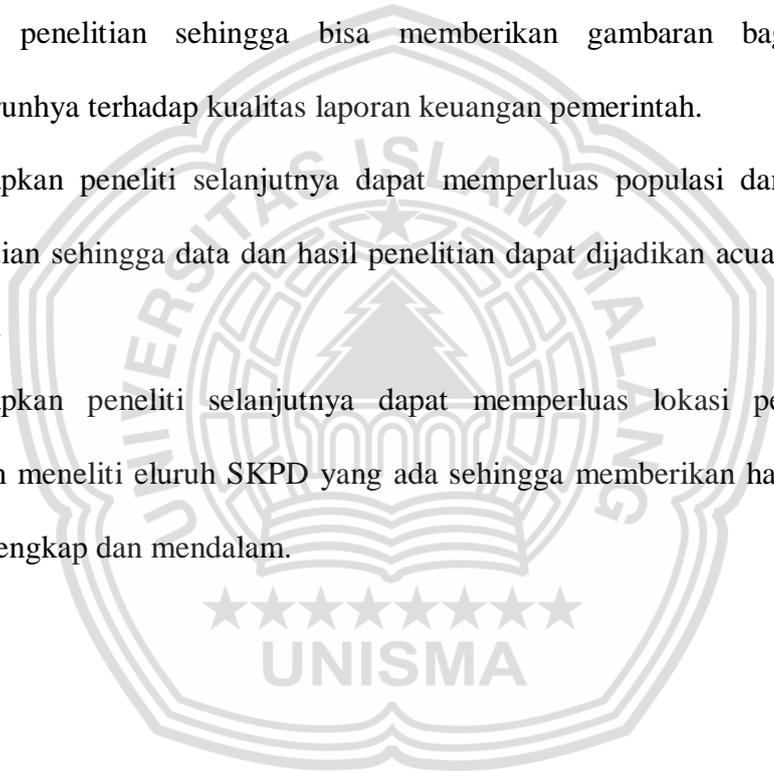
#### 1.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas dua variabel independen saja yaitu penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga ada kemungkinan bahwa terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang tidak diambil untuk diteliti dalam penelitian ini.

2. Populasi dalam penelitian ini hanya mencakup satu lingkup daerah saja yaitu Kabupaten Bima, NTB.
3. Adanya keterbatasan pengambilan lokasi penelitian dimana hanya beberapa SKPD yang dapat diteliti dan dijadikan sampel penelitian .

### 1.3 Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain dalam penelitian sehingga bisa memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan lokasi penelitian sehingga data dan hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam penelitian
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dengan meneliti seluruh SKPD yang ada sehingga memberikan hasil yang lebih lengkap dan mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). *E-Skripsi Akuntansi*.
- Darma Putra, I., & Ariyanto, D. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 14-32.
- Febrian Cahyo Pradono, & Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1-3.
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, Antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Volume 3 nomor 1.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. 2010. *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010*. 1-30.
- Rudianto, 2012. Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Adaptasi IFRS. Jakarta: Erlangga.
- Soloha, C. 2015. Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Morotai. *Jurnal Politico*, 2(6).
- Suhardjo, D.K.A. dan Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semareang*, 5(3), 93-111.



Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governence dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.

